



ANALISIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KONDISI MASYARAKAT HILIR SUNGAI BARITO BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN

Parida Angriani*, Eva Alviawati, Sheilla Farazela

Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

*Email koresponden: parida.angriani@ulm.ac.id

Diterima: 06-10-2021, Revisi: 29-11-2021, Disetujui: 24-12-2021

©2021 Program Studi Pendidikan Geografi, FISE, Universitas Hamzanwadi

Abstrak Sungai Barito merupakan sungai besar yang membentang dari Kalimantan Tengah hingga bermuara di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam pengelolaannya memerlukan sinergitas dari semua pihak dan berkelanjutan mulai dari hulu sampai hilir sungainya. Sungai ini juga memiliki keterkaitan dengan kondisi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Selama ini dalam pengelolaan lingkungan sungai, masyarakat hanya dianggap sebagai objek, padahal masyarakat tersebut adalah orang yang bersentuhan langsung dengan kondisi sebenarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kondisi eksisting masyarakat hilir Sungai Barito dan hubungannya dengan lingkungan sungai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survey. Data dalam penelitian ini mengacu pada hasil survei lapangan dalam bentuk observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara pembobotan kemudian menyusun tingkatan pada tiap variabel kondisi masyarakat dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif empirik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi eksisting masyarakat hilir Sungai Barito dilihat dari kondisi fisik dan lingkungan pemukiman serta kondisi sosial ekonomi masyarakat termasuk dalam kondisi yang rentan. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar rumah yang dibangun warga berbatasan langsung dengan sungai (di atas sungai) dan saling berdempetan/berlapis satu sama lainnya sehingga terkesan kumuh/padat.

Kata kunci: pengelolaan lingkungan, masyarakat hilir sungai, Sungai Barito

Abstract The Barito River is a large river that stretches from Central Kalimantan to the city of Banjarmasin, South Kalimantan. Its management requires synergy from all parties and is sustainable from upstream to downstream of the river. This river also has a relationship with the conditions of the people who live around it. So far, in the management of the river environment, the community is only considered as an object, even though the community is a person who is in direct contact with the actual condition. The purpose of this study is to analyze the existing conditions of the downstream community of the Barito River and its relationship to the river environment. The method used in this research is quantitative with a survey approach. The data in this study refers to the results of field surveys in the form of observations, questionnaires, interviews, and documentation. Data analysis was carried out by weighting and then arranging levels for each variable of community conditions and then analyzed by empirical descriptive. The results of the study indicate that the existing conditions of the people downstream of the Barito River are seen from the physical and environmental conditions of the settlement as well as the socio-economic conditions of the community, including in a vulnerable condition. This condition occurs because most of the houses built by residents are directly adjacent to the river (above the river) and are attached layered with each other so that they seem slum/ congested.

Keywords: environmental management, downstream community, Barito River

PENDAHULUAN

Sungai Barito bermuara langsung pada Laut Jawa dan terhubung langsung dengan kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hulu Sungai Barito berada di kaki pegunungan Muller perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dari kaki pegunungan Muller hingga mencapai muara Laut Jawa, panjang Sungai Barito mencapai 900 km, dengan lebar 650 m hingga mencapai 1000 m. Di

Kalimantan Selatan, Sungai Barito memiliki cabang dua anak sungai, yaitu Sungai Martapura dan Sungai Nagara. Untuk kota Banjarmasin sendiri, yang terhubung langsung dengan muara Sungai Barito adalah Sungai Kuin dan Sungai Alalak.

Secara umum sungai berperan dalam membentuk perwajahan suatu wilayah, yaitu memberikan karakter khusus yang membedakannya dengan wilayah lain. Sungai bagi kota Banjarmasin sangat berpengaruh pada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakatnya. Keberadaan sungai dalam suatu kawasan dengan karakter fisik yang berbeda dari wilayah yang dilewatinya menjadikan sungai sebagai *edges* (batas/tepi) suatu kawasan (Angriani, Sumarmi, Rujia, & Bachri, 2017; Lynch, 1960). Sungai memiliki peran strategis dan bersifat multiguna dalam mendukung pembangunan dan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sepanjang sungai (Angriani, Sumarmi, Rujia, & Bachri, 2016, 2018; Buzarboruah, 2014; Rochgiyanti, 2011). Terbentuknya ruang terbuka sungai dan tepinya sebagai suatu kawasan menghasilkan variasi fungsi kawasan yang dilalui sungai. Salah satunya adalah memanfaatkan kawasan tepi sungai sebagai tempat bermukim.

Kawasan permukiman yang ada di pinggir sungai di satu sisi adalah bentuk perwujudan dari budaya lokal, tetapi di sisi lain hal itu menimbulkan permasalahan tersendiri terutama terkait dengan hukum dan undang-undang khususnya bangunan yang dibangun berada di dekat sungai (bantaran sungai), atau sebagian di darat dan sebagian di atas air, atau semua bagian di atas air (Utomo & Prijotomo, 2009). Kondisi ini memerlukan penanganan yang serius dan sinergitas dari semua pihak yang terkait, terutama dalam usaha pemeliharaan dan pengelolaannya (Angriani et al., 2018; Bernhardt & Palmer, 2011; Lin, Shaad, & Girot, 2016; Vollmer, Prescott, Padawangi, Girot, & Grêt-Regamey, 2015).

Pengelolaan sempadan sungai di wilayah perkotaan pada prinsipnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai. Kondisinya dinyatakan status *quo* dan dilakukan penertiban. Status *quo* diartikan sebagai kondisi yang diupayakan tetap, keberadaannya tidak mengalami penambahan dan perbaikan. Sedangkan penertiban diupayakan semaksimal mungkin pemindahan dari daerah sempadan sungai. Namun, untuk daerah-daerah yang secara morfologis penduduk harus bertempat tinggal di pinggir sungai atau sempadan sungai, karena di luar pinggir sungai tidak memungkinkan, maka kondisi status *quo* diartikan sebagai kondisi *zero growth* dengan jumlah bangunan permukiman tidak bertambah tanpa terkendali. Intinya adalah mengupayakan sebaik mungkin agar sempadan sungai tetap terjaga kealamiahannya (Kodoatie & Sjarief, 2008; Maryono, 2014).

Pengelolaan lingkungan sungai memerlukan suatu penanganan secara intensif, efektif dan berkelanjutan yang berkaitan langsung di lapangan guna meningkatkan kualitas kondisi masyarakat yang ada di bantaran sungai (Laurens, 2012; Putri, Seftinar, & Daulay, 2019; Suganda, Yatmo, & Atmodiwirjo, 2009). Selama ini dalam pengelolaan lingkungan sungai, masyarakat hanya dianggap sebagai objek, padahal masyarakat tersebut adalah orang yang bersentuhan langsung dengan kondisi sebenarnya (Padawangi et al., 2016; Prescott & Ninsalam, 2016). Menumbuhkan kembali rasa kepemilikan masyarakat (*sense of belonging*) terhadap lingkungan sungai perlu dilakukan. Permasalahan inilah yang diangkat dalam tulisan ini. Sebagai studi pendahuluan, tujuan dari penulisan adalah melakukan analisis awal terhadap kondisi eksisting masyarakat hilir Sungai Barito dan hubungannya dengan lingkungan sungai.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survey. Data dalam penelitian ini mengacu pada hasil survey lapangan yang dilakukan pada bulan Juni - Juli 2021. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan cara *area sampling*, yaitu wilayah yang terletak di bagian hilir Sungai Barito di Kecamatan Banjarmasin Utara. Unit analisisnya adalah Kelurahan Alalak Tengah, Kelurahan Alalak Selatan, dan Kelurahan Kuin Utara dengan kriteria daerah di sepanjang bantaran Sungai Barito (Gambar 1).

Data empiris dalam penelitian ini berasal dari masyarakat yang tinggal di sepanjang muara sungai Barito Kota Banjarmasin, tepatnya yang berada di bantaran sungai. Pemilihan sampel dilakukan kepada masyarakat di setiap kelurahan yang berada di sepanjang bantaran sungai dengan jarak < 100 meter dari bantaran sungai tanpa tanggul. Penentuan jarak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun

2011 tentang Sungai. Setiap kelurahan diambil 25 sampel responden dengan mengacu pada kriteria pemilihan sampel.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
(Sumber: Google Earth, 2021)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas: 1) observasi, dilakukan untuk memperoleh data tentang kondisi muara sungai Barito dan profil masyarakat daerah penelitian; 2) kuesioner, digunakan untuk mendapatkan data dari responden sampel penelitian yang berupa data kondisi fisik, lingkungan dan sosial ekonomi. Agar hasil kuesioner berimbang, maka dilakukan wawancara mendalam kepada pihak terkait guna menambah informasi mengenai pengelolaan lingkungan sungai; dan 3) dokumentasi, digunakan untuk menunjang analisis penelitian, baik yang diperoleh dari instansi pemerintah, seperti dari BPS kota Banjarmasin, Bidang Sungai DPUPR, Bidang Penanganan Kawasan Lingkungan Permukiman Kumuh Disperkim, Dinas Lingkungan Hidup, maupun pihak kecamatan dan kelurahan.

Analisis data penelitian terdiri dari: 1) *scoring* dan pembobotan berdasarkan aktivitas lapangan; 2) penyusunan tingkatan pada tiap variabel kondisi masyarakat (parameter kondisi fisik, kondisi lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi); dan 3) melakukan analisis secara deskriptif empirik yang kemudian didiskusikan dengan kebijakan pemerintah melalui UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan, PP Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai, Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai, dan Perda Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penetapan Pengaturan Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai. Pemberian skoring menggunakan pendekatan skala Likert dengan tiga alternatif jawaban. Berikut disajikan parameter dan variabel terkait analisis tingkat kondisi masyarakat.

Tabel 1. Parameter dan Variabel Analisis Tingkat Kondisi Masyarakat

Parameter	Indikator tingkat kondisi masyarakat	Bobot	Skor	Kriteria	Sumber
Fisik	Jarak bangunan terhadap sungai	1	3	0 – 35 m	• PP No. 38 Tahun 2011
			2	36 – 68 m	
			1	>68 m	
	Jenis bangunan	1	3	Rumah tingkat	Tentang Sungai
			2	<i>Bedakan</i> /Barak	
			1	Rumah tunggal	
	Bahan bangunan	1	3	Kayu	• (Suganda et al.,
			2	Plesteran	

			1	Batu bata	2009)
	Luas lahan bangunan	1	3	12 – 15 m ²	
			2	16 – 21 m ²	
			1	>21 m ²	
Lingkungan	Pembuangan sampah	1	3	Sungai	• (Putri et al., 2019)
			2	Lahan terbuka	
			1	Bak sampah	
	Pembuangan limbah WC	1	3	Sungai	
			1	Septictank	
	Kondisi lingkungan	1	3	Kumuh	
			2	Sedang	
			1	Tidak kumuh	
	Industri rumahan	1	3	Ada	
			1	Tidak ada	
	Kondisi kesehatan masyarakat permukiman	1	3	Sakit, seperti: penyakit kulit, diare/muntaber, ISPA	
			1	Tidak ada yang sakit	
	Peran sungai bagi masyarakat	1	3	MCK	
			2	Air minum	
			1	Transportasi, irigasi	
	Sumber air	1	3	Air sungai	
			2	PDAM	
			1	Air galon	
Sosial ekonomi	Pendidikan	1	3	SD / SMP	• (Setyaning rum & Giyarsih, 2012)
			2	SMA	
			1	Diploma / Sarjana	
	Pekerjaan	1	3	Buruh/kuli/tidak bekerja	
			2	Wiraswasta/pengusaha/karyawan swasta	
			1	PNS/TNI/POLRI	
	Status penduduk	1	3	Asli	
			1	Pendatang	
	Status kepemilikan bangunan	1	3	Hak milik	
			2	Warisan	
			1	Kontrak/sewa	

Tabel 2. Kelas Tingkatan Kondisi Masyarakat Berdasarkan Faktor Resiko

No.	Skor	Kelas kondisi masyarakat berdasarkan faktor resiko	Keterangan
1.	3	Tinggi	Rentan terhadap bencana
2.	2	Sedang	
3.	1	Rendah	Tidak rentan terhadap bencana

Sumber: Putri et al., 2019.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Eksisting Permukiman Masyarakat Hilir Sungai Barito

Umumnya pola permukiman yang berkembang di sepanjang hilir Sungai Barito adalah memanjang sepanjang sungai dan sepanjang jalan. Pola ini terbentuk karena budaya yang ada di masyarakat terkait dengan cara hidup, cara beradaptasi dengan lingkungan, serta pemenuhan kebutuhan yang bergantung dengan sungai. Pola permukiman ini terbentuk secara alamiah dan berkembang karena kondisi lingkungan dan aktivitas kehidupan masyarakat yang memanfaatkan sungai sebagai prasarana untuk melakukan pergerakan (Garib & Noorhamidah, 2017).

Rumah warga yang ada di atas sungai pada awalnya dibuat dalam bentuk rumah apung atau dikenal dengan *Rumah Lanting*. Sedangkan rumah yang berada di darat, orientasi rumah selalu menghadap sungai dengan bentuk rumah panggung. Tetapi, seiring dengan perkembangan waktu, pemukiman ini berubah menjadi kawasan yang cukup padat. Banyak bangunan pemukiman warga dibangun tepat di kiri-kanan badan sungai secara permanen/semi permanen dengan orientasi rumah

sebagian besar menghadap ke jalan. Rumah-rumah tersebut dibangun sebagian di atas tanah dan sebagian lagi di atas sungai atau menjorok ke tengah badan sungai.

Kondisi fisik permukiman masyarakat Hilir Sungai Barito

Parameter kondisi fisik permukiman masyarakat dilihat dari jarak bangunan terhadap sungai, jenis bangunan, jenis bahan bangunan, dan luas lahan bangunan (Tabel 3).

Tabel 3. Profil Kondisi Fisik Permukiman Masyarakat Hilir Sungai Barito

Parameter	Indikator	Kriteria	Alalak Tengah (N=25)	Alalak Selatan (N=25)	Kuin Utara (N=25)	Persentase (%) (N=75)
Fisik	Jarak bangunan terhadap sungai	0 – 35 m	20	25	23	91
		36 – 68 m	5	0	2	9
		>68 m	0	0	0	0
Jenis bangunan		Rumah tingkat	19	1	2	29
		Barak/Bedakan	6	9	5	27
		Rumah tunggal	0	15	18	44
Bahan bangunan		Kayu	25	23	25	97
		Plesteran	0	0	0	0
		Batu bata/cor	0	2	1	3
Luas lahan bangunan		12 – 15 m ²	9	6	5	27
		16 – 21 m ²	5	8	14	36
		>21 m ²	11	11	6	37

Sumber: Hasil olahan data primer, 2021.

Berdasarkan Tabel 3 dan didukung hasil survei tim peneliti di lapangan, diketahui bahwa sebagian besar penduduk yang bermukim di sepanjang hilir Sungai Barito yang pemukimannya berbatasan langsung dengan sungai, jarak rumah penduduk terhadap sungai rata-rata 0 – 35 m, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai disebutkan bahwa jarak ideal adalah >68 meter dari pangkal sungai yang tidak bertanggung. Jika jarak bangunan kurang dari 35 meter dari sungai, maka rumah penduduk rentan terhadap pasang surut air Sungai Barito. Sedangkan jika dilihat dari jenis bangunan rumah adalah rumah panggung yang dibangun di atas sungai dengan tipe tunggal tetapi saling berdempetan/berlapis satu sama lainnya, sehingga terkesan kumuh (Gambar 2). Bahan bangunan rumah-rumah tersebut berasal dari kayu. Bahan konstruksi ini sudah sangat umum digunakan bagi rumah-rumah yang ada di pinggir sungai. Pengetahuan ini sudah sejak dulu berkembang di masyarakat, terutama bagi masyarakat Banjar dan menjadi tradisi turun temurun. Di samping itu, bahan konstruksi tersebut apabila dilihat dari aspek teknologi dan ekonomi yang paling terjangkau untuk daerah basah adalah kayu (Angriani et al., 2016).



Gambar 2. Kondisi Fisik Permukiman Masyarakat Hilir Sungai Barito (Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2021)

Berdasarkan Gambar 2, dapat dipahami bahwa sistem rumah panggung yang terbentuk pada masyarakat pinggir sungai merupakan salah satu proses adaptasi masyarakat terhadap lingkungan yang

ada. Tetapi pada perkembangan selanjutnya, dengan semakin padatnya permukiman yang ada di pinggir sungai, proses adaptasi tersebut hanya sebagai bentuk dari proteksi terhadap diri sendiri dan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi tidak memperhitungkan akibat yang diterima oleh lingkungan akibat adaptasi yang dilakukan.

Kondisi lingkungan permukiman masyarakat Hilir Sungai Barito

Parameter kondisi lingkungan permukiman masyarakat dilihat tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan limbah WC, kepadatan/kekumuhan lingkungan pemukiman, keberadaan industri rumahan, kondisi kesehatan masyarakat, peran sungai bagi masyarakat, dan sumber air untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Berikut disajikan tabel kondisi lingkungan permukiman masyarakat hilir Sungai Barito.

Tabel 4. Profil Kondisi Lingkungan Permukiman Masyarakat Hiliri Sungai Barito

Parameter	Indikator	Kriteria	Alalak Tengah (N=25)	Alalak Selatan (N=25)	Kuin Utara (N=25)	Persentase (%) (N=75)
Lingkungan	Pembuangan sampah	Sungai	8	10	9	36
		Lahan terbuka	4	6	4	19
		TPS	13	9	12	45
Pembuangan limbah WC	Septiktank	Sungai	8	10	21	52
		Septiktank	17	15	4	48
Kepadatan/kekumuhan	Padat/kumuh	Sungai	13	21	11	60
		Sedang	11	4	13	37
		Jarang/tidak kumuh	1	0	1	3
Keberadaan industri rumahan	Ada	Tidak ada	15	16	10	55
		Tidak ada	10	9	15	45
Kondisi kesehatan	Sakit	Tidak ada yang sakit	11	9	8	37
		Tidak ada yang sakit	14	16	17	63
Peran sungai	MCK	Air minum	19	13	23	73
		Transportasi	0	0	0	0
		Transportasi	6	12	2	27
Sumber air untuk MCK	Sungai	PDAM	14	7	12	44
		PDAM	11	18	13	56
		Air galon	0	0	0	0
Sumber air untuk minum & memasak	Sungai	PDAM	0	0	1	1
		PDAM	21	22	15	78
		Air galon	4	3	9	21

(Sumber: hasil olahan data primer, 2021)

Berdasarkan Tabel 4, ketiga kelurahan yang menjadi lokasi penelitian merupakan lokasi yang padat penduduk dan cenderung kumuh. Kepadatan penduduk ini terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan ruang/lahan yang ada di wilayah tersebut. Hasil kuesioner dan dilengkapi dengan wawancara serta data survey lapangan, menunjukkan bahwa secara umum masyarakat sebenarnya sudah sadar akan kebersihan lingkungan sungai, tetapi karena kebiasaan dan kondisi masyarakat menyebabkan sungai dianggap sebagai area belakang (*back yard*). Hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai dengan alasan lebih praktis. Sedangkan untuk limbah WC sebagian besar masyarakat langsung membuang ke sungai karena jamban yang tersedia belum dilengkapi dengan septiktank, misalpun ada tersedia, septiktank tersebut masih tradisional yaitu terbuat dari kayu sehingga rawan merembes ke sungai karena kurang memadai. Apabila keadaan ini terus dibiarkan maka dapat menyebabkan menurunnya kualitas air sungai (Gambar 3).



Gambar 3. Sungai menjadi Tempat Pembuangan Sampah dan Limbah Toilet
(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2021)

Di lain pihak, bagi masyarakat yang berada di pinggiran sungai, sungai masih memiliki peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, melalui pemanfaatan sungai untuk keperluan mandi, mencuci, bahkan transportasi. Adanya keterkaitan ini menggambarkan bahwa sungai masih menjadi tempat penyedia fasilitas bagi kehidupan sehari-hari mereka. Tetapi ada ketidakkonsistenan dalam kebiasaan masyarakat terkait dengan sungai, seperti masih membuang sampah dan limbah WC ke sungai, sehingga dapat menimbulkan pencemaran.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Hilir Sungai Barito

Parameter kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan pada indikator tingkat pendidikan, pekerjaan, status penduduk, dan status kepemilikan bangunan tempat tinggal Berikut disajikan tabel kondisi sosial ekonomi masyarakat hilir Sungai Barito.

Tabel 5. Profil Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Hilir Sungai Barito

Parameter	Indikator	Kriteria	Alalak Tengah (N=25)	Alalak Selatan (N=25)	Kuin Utara (N=25)	Persentase (%) (N=75)
Sosial Ekonomi	Pendidikan	SD – SMP	22	19	18	79
		SMA	3	6	7	21
		PT	0	0	0	0
	Pekerjaan	Buruh/kuli/ tidak bekerja	14	14	15	57
		Wiraswasta/ pengusaha/ karyawan swasta	11	10	9	40
		PNS/TNI/ POLRI	0	1	1	3
Status penduduk		Asli	22	23	24	92
		Pendatang	3	2	1	8
Status kepemilikan bangunan		Hak milik	12	15	9	48
		Warisan Sewa/kontrak	9 4	7 3	11 5	36 16

(Sumber: hasil olahan data primer, 2021)

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan para responden terkait alasan masyarakat kenapa memilih tinggal di daerah pinggiran sungai yaitu karena sudah menjadi kebiasaan turun temurun (tradisi). Artinya kebiasaan ini sudah ada sejak dulu. Rumah-rumah yang ada di pinggiran sungai ini berdasarkan status kepemilikannya sebagian besar adalah hak milik, dengan dibuktikan dalam bentuk sertifikat hak milik, akta jual beli, maupun segel adat. Padahal berdasarkan peraturan pemerintah, tinggal di bantaran sungai adalah sesuatu yang ilegal. Oleh karena itu, untuk menekan laju pertumbuhan permukiman di sepanjang sungai, pada tahun 2012 Pemerintah Kota Banjarmasin menerapkan sistem

Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT). Dasar penetapan ini adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penetapan Pengaturan Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032.

Peraturan-peraturan daerah tersebut menjelaskan bahwa bangunan/rumah yang ada di pinggir sungai masuk ke dalam status *quo*. Artinya kondisi yang diupayakan tetap, keberadaannya tidak mengalami penambahan dan perbaikan. Masyarakat yang terlanjur mendirikan bangunan rumah sebelum peraturan dibuat mereka tetap boleh menempati rumahnya selama belum ada rencana penggusuran oleh pemerintah, tetapi mereka tidak boleh menambah ukuran panjang rumah termasuk melakukan renovasi bangunan. Status kepemilikannya tetap diakui, tetapi pemilik lahan wajib mematuhi penetapan peruntukan bagi lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain.

Berdasarkan tiga parameter yang telah disebutkan maka dapat dijelaskan kondisi masyarakat yang bermukim di sepanjang pinggir muara Sungai Barito. Pada masyarakat tersebut terindikasi adanya perilaku yang tidak memelihara sungai. Ini terlihat dari rendahnya kepedulian masyarakat pinggir sungai dengan pemeliharaan lingkungan sungai. Permasalahan sungai termasuk degradasi lingkungan erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan (Putri et al., 2019; Suganda et al., 2009). Permukiman padat di sepanjang sungai cenderung mengakibatkan terhambatnya aliran sungai, karena banyaknya sampah domestik yang dibuang ke sungai. Kebiasaan ini disebabkan karena berubahnya pandangan terhadap sungai. Di masa lalu, sebelum pembangunan jalan darat belum begitu berkembang, sungai dianggap sebagai halaman depan (*front yard*). Tetapi seiring dengan perkembangan pembangunan, jalan darat semakin mudah diakses mengakibatkan sungai semakin terlupakan dan berakhir menjadi area belakang (*backyard area*) atau hanya sebagai tempat aktivitas “belakang”. (Dahlia, 2012; Geonmiandari, Silas, & Supriharjo, 2010; Ira Mentayani, 2016; Ira Mentayani, Nuryanti, Prayitno, & Sarwadi, 2011).

Adanya perubahan ini lebih didominasi karena faktor ekonomi dan sarana prasarana yang tersedia di lingkungan tersebut. Dengan berkembangnya jalan darat dan didukung dengan kemajuan transportasi darat, maka dari segi ekonomi akan memberikan banyak pilihan dibandingkan dengan yang ada di sungai. Kondisi inilah selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk pengelolaan lingkungan di kawasan hilir Sungai Barito baik yang berasal dari pemerintah maupun yang berbasis masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kondisi eksisting masyarakat hilir Sungai Barito dilihat dari kondisi fisik dan lingkungan pemukiman serta kondisi sosial ekonomi masyarakat 58% termasuk dalam kategori rentan terhadap bencana. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar rumah yang dibangun warga berbatasan langsung dengan sungai (di atas badan sungai) dan saling berdempetan/berlapis satu sama lainnya sehingga terkesan kumuh/padat. Kepadatan penduduk ini terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan ruang/lahan yang ada di wilayah tersebut. Kepadatan ini akan berdampak pada tingginya tekanan kawasan permukiman terhadap lingkungan sungai. Permukiman padat di sepanjang sungai cenderung mengakibatkan terhambatnya aliran sungai, karena banyaknya sampah domestik yang dibuang ke sungai. Kebiasaan ini disebabkan karena berubahnya pandangan terhadap sungai (sungai menjadi area belakang). Pengetahuan masyarakat juga berpengaruh terhadap kondisi ini. Idealnya semakin baik pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan sungai maka semakin tinggi pula kepedulian mereka terhadap lingkungan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada LP2M Universitas Lambung Mangkurat yang telah memfasilitasi program PDWM 2021. Penelitian ini dibiayai oleh DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021, Nomor: SP DIPA – 023.17.2.677518/2021 tanggal 23 November

2020, Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 697/UN8/PG/2021 Tanggal 22 Maret 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Angriani, P., Sumarmi, S., Ruja, I. N., & Bachri, S. (2016, May 24-26). *The Meaning of River for Banjarmasin Community, South Kalimantan, Indonesia*. Paper presented at the 4th International Conference Language, Society and Culture in Asian Contexts (LSCAC 2016), Malang, Indonesia.
- Angriani, P., Sumarmi, S., Ruja, I. N., & Bachri, S. (2017, November 03-04). *Rivers and City Image of Banjarmasin - South Kalimantan*. Paper presented at the 1st International Conference on Social Sciences Education - "Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment" (ICSSE 2017).
- Angriani, P., Sumarmi, S., Ruja, I. N., & Bachri, S. (2018). River Management: The Importance of the Roles of the Public Sector and Community in River Preservation in Banjarmasin (A case study of the Kuin River, Banjarmasin, South Kalimantan – Indonesia). *Sustainable Cities and Society*, 43, 11-20.
- Bernhardt, E. S., & Palmer, M. A. (2011). River Restoration: The Fuzzy Logic of Repairing Reaches to Reverse Catchment Scale Degradation. *Ecological Applications*, 21(6), 1926–1931.
- Buzarboruah, P. D. (2014). Rivers and the Assame Folk Life: a Right Relationship of Man and Nature. *International Journal of Social Sciences, Arts and Humanities*, 2(2), 33-45.
- Dahlani. (2012). Konsep Pengolahan Tapak Permukiman di Lahan Rawa, Banjarmasin. *Lanting*, 1(2), 96-105.
- Garib, T. W., & Noorhamidah, N. (2017). Pola Sirkulasi Kawasan Tepi Sungai Kahayan Kota Palangka Raya. *Geodika*, 1(1), 9-17.
- Geonmiandari, B., Silas, J., & Supriharjo, R. (2010). *Konsep Penataan Permukiman Bantaran Sungai di Kota Banjarmasin Berdasarkan Budaya Setempat*. Paper presented at the Seminar Nasional Perumahan Permukiman dalam Pembangunan Kota, Surabaya.
- Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2008). *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Andi.
- Laurens, J. M. (2012). Changing Behavior and Environment in a Community-Based Program of the Riverside Community. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 36(Supplement C), 372-382.
- Lin, E., Shaad, K., & Girot, C. (2016). Developing river rehabilitation scenarios by integrating landscape and hydrodynamic modeling for the Ciliwung River in Jakarta, Indonesia. *Sustainable Cities and Society*, 20, 180-198.
- Lynch, K. (1960). *The Image of the City*: Harvard U.P.; Oxford U.P.
- Maryono, A. (2014). *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai dengan Pendekatan Integral: Peraturan, Kelembagaan, Tata Ruang, Sosial, Morfologi, Ekologi, Hidrologi, dan Keteknikan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mentayani, I. (2016, 10/05/2016). *Identity and Existence Riverside Settlement of Banjarmasin*. Paper presented at the Seminar Nasional Universitas Lambung Mangkurat: Potensi, Peluang, dan Tantangan Pengelolaan Lingkungan Lahan Basah secara Berkelanjutan, Banjarmasin.
- Mentayani, I., Nuryanti, W., Prayitno, B., & Sarwadi, A. (2011, 26 Juli 2011). *Penataan Permukiman Tepian Sungai Berbasis Mitigasi Struktural, Studi Kasus: Permukiman Tepian Sungai Di Kota Banjarmasin*. Paper presented at the Seminar Nasional Mitigasi & Ketahanan terhadap Bencana, Universitas Sultan Agung, Semarang.
- Padawangi, R., Turpin, E., Herlily, Prescott, M. F., Lee, I., & Shepherd, A. (2016). Mapping an alternative community river: The case of the Ciliwung. *Sustainable Cities and Society*, 20, 147-157.

- Prescott, M. F., & Ninsalam, Y. (2016). The synthesis of environmental and socio-cultural information in the ecological design of urban riverine landscapes. *Sustainable Cities and Society*, 20, 222-236.
- Putri, M. K., Seftinar, H., & Daulay, R. W. (2019). Analisis Pengaruh Pengelolaan Lingkungan terhadap Kondisi Masyarakat Hilir Sungai Musi. *Geografi*, 16(2), 10.
- Rochgiyanti. (2011). Fungsi sungai bagi masyarakat di tepian Sungai Kuin kota Banjarmasin. *Jurnal Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 3(1).
- Setyaningrum, P., & Giyarsih, S. R. (2012). Identifikasi Tingkat Kerentanan Sosial Ekonomi Penduduk Bantaran Sungai Code Kota Yogyakarta terhadap Bencana Lahar Merapi. *Bumi Indonesia*, 1(3), 9.
- Suganda, E., Yatmo, Y., & Atmodiwirjo, P. (2009). Pengelolaan Lingkungan dan Kondisi Masyarakat Pada Wilayah Hilir Sungai. *Makara, Sosial Humaniora*, 13(2), 143-153.
- Utomo, S. B., & Prijotomo, J. (2009). Upgrading of traditional housing on waterfront areas: A case of legality and tradition. *Informal Settlements and Affordable Housing*, 2, 89-97. Retrieved from <http://www.irbnet.de/daten/iconda>
- Vollmer, D., Prescott, M. F., Padawangi, R., Girot, C., & Grêt-Regamey, A. (2015). Understanding the value of urban riparian corridors: Considerations in planning for cultural services along an Indonesian river. *Landscape and Urban Planning*, 138, 144-154.